

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan abad ke 15 M hingga abad ke-16 M, terdapat sebuah kerajaan kecil di Jawa Barat yang berdiri dengan kokohnya. Kerajaan tersebut adalah Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang ternama yang terletak di Pantai utara Pulau Jawa.¹ Kesultanan Cirebon ini mempunyai pengaruh besar di Kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan tersebut dipimpin oleh Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Aulya Allah Kutubiz-Zaman Kolofaturrasulillah atau biasa disebut Sunan Gunung Djati. Selama memerintah kerajaannya, Sunan Gunung Djati bermarkas di Keraton Pakungwati yang kemudian menjadi pusat pemerintahan. Namun, perkembangan suatu kekuatan tidak selalu sama, oleh karena itu kerajaan Islam Cirebon mengalami kemunduran dan terpecah belah. Peninggalan arkeologisnya kini menjadi saksi penyebab perpecahan dan terbaginya keraton sebagai pusat kerajaan. Beberapa pembagian tersebut salah satunya yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon.²

Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki sejarah panjang dan merupakan keraton tertua di Cirebon. Keraton ini dibangun dalam beberapa periode, mulai dari zaman Hindu-Buddha sampai zaman Islam. Istana ini identik dengan bangunan-bangunan mewah dan megah dan ditempati oleh keluarga kerajaan karena pada

¹ Soedjipto Abimanyu, *Babad Tanah Jawi*, Yogyakarta: Laksana, 2017, hlm. 444

² Wawan Hernawan, Keraton Cirebon dalam Aliran Sejarah 1452-1809), *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2023, Vol. 21, No. 1, hlm. 289-324.

dasarnya istana merupakan tempat kediaman raja. Tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal dan pemerintahan, keraton juga digunakan sebagai tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan resmi suatu kerajaan pada masa tersebut. Selain itu juga digunakan sebagai tempat belajar para ulama, tempat menerima bimbingan, pendidikan, pengembangan karakter dan tempat menjalani kehidupan yang berorientasi pada rasa hormat, keselarasan, kesabaran dan pelestarian keindahan dunia.³

Sejarah panjang Keraton Kasepuhan Cirebon tidak hanya menjadi saksi sejarah, namun juga merupakan warisan budaya dan berperan penting dalam proses keberagaman nilai-nilai Islam dan budaya lokal, selain sebagai simbol identitas masyarakat dari Cirebon. Selain itu, keraton ini tidak hanya berperan dalam aspek spiritual dan sosial masyarakat, tetapi juga dalam hubungan politik dengan penguasa kolonial yang menguasai Indonesia selama berabad-abad.

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan pada saat itu pula merupakan tanda di mana kesultanan dan kerajaan yang pada masa sebelumnya memiliki kekuasaan atas pemerintahan menyerahkan kekuasaannya dan sepakat untuk melebur dalam bentuk satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keadaan politik, sosial, dan budaya di Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis. Proklamasi tersebut dijadikan sebagai tanda bahwa masa kolonialisme yang telah

³ Subanar, Greorius Budi, *Esai-Esai Untuk Franz Magnis-Suseno: Sesudah Filsafat*, Yoyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 66.

terjadi selama ratusan tahun berakhir, tetapi tidak secara langsung membawa keadaan Indonesia menjadi stabil dan sesuai yang diinginkan.

Periode 1945-1949 yakni masa revolusi kemerdekaan menjadi suatu periode yang sangat penting dalam menentukan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun kemerdekaan telah dideklarasikan, namun belum adanya pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Bangsa Indonesia masih mempertahankan kedaulatannya dari upaya Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Nusantara. Dalam situasi tersebut, perlawanan terhadap Belanda tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan tentara nasional, tetapi melibatkan elemen masyarakat di daerah, termasuk lembaga tradisional seperti keraton.⁴

Revolusi yang terjadi di Cirebon periode 1945-1949, merupakan sebagian kecil daripada revolusi di seluruh Indonesia. Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu pusat kebudayaan dan kekuasaan tradisional yang memiliki peran signifikan dalam membangun semangat kebangsaan selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai institusi, keraton ikut menjembatani hubungan antara pemimpin tradisional dengan masyarakat. Tokoh-tokoh keraton kasepuhan aktif dalam memberikan inspirasi terhadap rakyat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Hubungan erat antara keraton dan masyarakat ini menciptakan solidaritas yang kuat, menunjukkan bahwa kekuatan tradisional mampu berkontribusi nyata dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari dominasi kolonial Belanda.

⁴ Sungaidi, M., & Ghozali, A. Peran Keraton Cirebon dalam Pembentukan Identitas Nasional pada Masa Kemerdekaan Indonesia: Analisis Politik Islam dan Nilai Nasionalisme. *Refleksi*, 2024, 23(2).

Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, baik sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun keraton ini berfungsi sebagai simbol identitas daerah, namun ikut berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Seharusnya, dengan berakhirnya penjajahan Belanda yang dilanjutkan Jepang atas wilayah Nusantara, kerajaan Cirebon ini menjadi wilayah yang merdeka. Akan tetapi, keraton kasepuhan Cirebon memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia yang baru berdiri. Pilihan ini mencerminkan sikap kebangsaan Keraton Kasepuhan Cirebon dan meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan kerajaan sendiri.⁵ Kehadiran keraton ini menunjukkan bahwa kekuatan tradisional dapat bersinergi dengan perjuangan nasional, memperkuat tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama masa revolusi kemerdekaan 1945-1949, Keraton Kasepuhan menjadi salah satu pusat kebudayaan dan kekuasaan tradisional yang memberikan kontribusi signifikan dalam membangun semangat kebangsaan. Tokoh-tokoh keraton aktif memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.

Tahun 1945-1949 menjadi batasan temporal dalam penelitian ini, pertama peneliti memilih tahun 1945 dipilih berdasarkan momen bersejarah dengan diproklamirkanya kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana penuh semangat revolusioner berbagai perlawanan rakyat pecah di seluruh penjuru negeri. Tahun ini menjadi tonggak awal perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan. Pada saat itu perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai

⁵ Ibid, hlm. 236

puncaknya. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi yang kemudian menandakan berakhirnya Revolusi Kemerdekaan. Dengan demikian, periode 1945-1949 mencakup seluruh dinamika revolusi, baik dalam perlawanan fisik, diplomasi, maupun peran serta kontribusi elemen bangsa, termasuk lembaga tradisional seperti Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perjuangan tersebut.

Penelitian ini berusaha mengungkap dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong dalam historiografi lokal Cirebon tentang peranannya terhadap kemerdekaan. Dengan meneliti dukungan dan peran keraton kasepuhan cirebon pada masa revolusi kemerdekaan, penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh keraton, baik secara material maupun non-material, peran para tokoh, dan dampak keterlibatan Keraton Kasepuhan dalam perjuangan kemerdekaan terhadap status dan peran keraton setelah kemerdekaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap kemerdekaan dengan judul “Dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap Pemerintahan Republik Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945-1949”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana Dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap Pemerintahan Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949?. Rumusan masalah tersebut dituangkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kemerdekaan terhadap posisi Keraton Kasepuhan Cirebon?
2. Bagaimana sikap Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa revolusi kemerdekaan 1945-1949?
3. Bagaimana dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi 1945-1949?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaki, sekaitannya dengan hal itu tujuan ini sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian yang berjudul “Dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap Pemerintahan Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949”, ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kemerdekaan terhadap posisi Keraton Kasepuhan Cirebon
2. Mengidentifikasi sikap Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa revolusi kemerdekaan 1945-1949
3. Mengetahui dukungan apa saja yang diberikan Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi 1945-1949

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teroetis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat berkontribusi pada penelitian dalam berbagai bidang ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan politik serta dapat dimanfaatkan sebagai referesi bagi para akademisi baik untuk menambah pemahaman ataupun wawasan mengenai topik yang dibahas.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pihak keraton: sebagai penguat legitimasi dan posisi keraton sebagai institusi yang relevan dan diakui baik oleh masyarakat maupun pengakuan dari internasional.
- 2) Bagi masyarakat: menjadi sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai Keraton Kasepuhan Cirebon mulai dari berdiri, terjadi perubahan, bahkan sampai saat ini yang masih terjaga beserta peran dan dukungannya dalam perjuangan kemerdekaan.
- 3) Bagi pemerintah: hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terutama dalam hal pemahaman sejarah nasional dengan mengungkap peran apa saja yang dilakukan oleh keraton dalam perjuangan kemerdekaan, pengembangan kebijakan, dan pelestarian budaya. Dengan memahami model kepemimpinan sultan Kasepuhan pada saat itu dalam memobilisasi masyarakat dapat menjadi contoh untuk kepemimpinan lokal seperti pemerintah agar efektif serta turut aktif dalam membangun bangsa.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

1.5.1.1 Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan yang membawa pengaruh.⁶ Pengaruh ini terjadi sesuai dengan keinginan pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga dapat membawa perubahan tertentu pada pihak lain. Dalam konteks organisasi, kekuasaan sering digunakan untuk mencapai tujuan bersama melalui pengaruh terhadap anggota kelompok. Pemahaman mengenai kekuasaan ini telah banyak dikaji oleh para ahli, salah satunya adalah Michel Foucault yang memberikan perspektif berbeda terkait konsep kekuasaan.

Konsep Kekuasaan menurut Michel Foucault berhubungan erat dengan konsep kepemimpinan. Karena dengan memiliki kekuasaan, pemimpin dapat mendapatkan alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Tidak seharusnya pemimpin hanya menilai perilakunya saja agar dapat mempengaruhi orang lain, namun pemimpin harus mampu menilai dan mengetahui akan posisinya serta menggunakan kekuasaannya dengan baik.

Michel Foucault mengatakan bahwa konsep kekuasaan bukan dari institusi yang terstruktur, bukan kekuasaan yang dimiliki, namun kekuasaan ini adalah istilah untuk menggambarkan situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat.⁷ Pandangan Foucault mengenai kekuasaan bukan seperti pada politik yang

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 17.

⁷ Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Al-Khitabah* Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 118.

umumnya diketahui banyak orang, dimana kekuasaan milik sekelompok atau sekumpulan minoritas yang memiliki kuasa atas kumpulan mayoritas. Kekuasaan menurut Foucault adalah bergerak dan tersebar dimana-mana bahkan tanpa disadari oleh objek kekuasaan tersebut. Untuk memahami konsep kekuasaan ini dapat dengan pertanyaan bagaimana kekuasaan itu beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan tersebut digerakkan. Dalam bukunya yang berjudul *The History Of Sexuality* Vol 1,⁸ Foucault menjelaskan bahwa terdapat lima perbandingan mengenai kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diraih, dipergunakan, bahkan dibagikan sebagai sesuatu yang dipegang dan dapat hilang, namun kekuasaan ini dijalankan dari berbagai relasi juga tempat yang terus bergerak.
2. Relasi yang terdapat dalam kekuasaan ini bukan relasi yang sistematis hierarki dengan bergantung pada terdapatnya yang dikuasai dan yang menguasai.
3. Kekuasaan tidak hanya berasal dari atas (penguasa), tetapi juga dari bawah (yang dikuasai). Pandangan ini menolak pembagian kedua hal tersebut antara penguasa dan yang dikuasai (*binary oppositions*) karena kekuasaan melibatkan keduanya.
4. Hubungan kekuasaan tidak hanya berasal dari satu orang atau kelompok, melainkan dari sistem praktik yang tertanam dalam masyarakat karena kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Dimana ada kekuatan, pasti terdapat perlawanan karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Semua orang yang terikat dalam sistem ini tidak ada yang benar-benar bebas⁹

Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang meresap ke dalam kehidupan kita tanpa disadari. Ini seperti sebuah sistem yang mengendalikan pikiran dan cara kita memandang dunia.

⁸ Michel Foucault, *The History of Sexuality. An Introduction Vol. 1*, New York: Vintage Books, 1990, hlm. 94-95.

⁹ Umar Kamahi, Op. Cit., hlm. 120.

1.5.1.2 Teori Legitimasi

Prinsip Legitimasi menurut Weber yaitu bahwa keberlangsungan suatu sistem bergantung pada kepercayaan orang-orang terhadap sistem tersebut. Sistem yang baik harus dapat meyakinkan orang-orang bahwa mereka harus ikut dan mendukungnya. Untuk itu, sistem seringkali menciptakan cerita atau mitos yang membuat seseorang merasa bahwa sistem tersebut benar dan adil.

Menurut Weber legitimasi tidak hanya dibangun secara sosial, tetapi juga bahwa potensi untuk mendapatkan legitimasi ini terletak pada persepsi warga negara terhadap sistem tersebut. Begitu pula dengan sebuah sistem atau tatanan hanya bisa dianggap sah jika masyarakat percaya bahwa sistem tersebut memang berhak ada. Untuk mendapatkan kepercayaan ini, atau biasa disebut legitimasi ini para pemimpin harus dapat meyakinkan masyarakat dengan cerita-cerita atau keyakinan tertentu yang sering disebut “mitos”. Jadi, legitimasi ini seperti menjual ide di mana para pemimpin harus membenarkan tindakan mereka sekaligus mempengaruhi pandangan masyarakat.

Terdapat tiga dasar utama yang membuat suatu sistem dianggap sah menurut Weber:

- 1) Alasan yang masuk akal, sistem ini sah karena ada aturan yang jelas dan orang-orang yang menjalankan aturan itu dipilih secara legal.
- 2) Adat istiadat, sistem ini dianggap sah karena ada aturan sejak lama dan dihormati oleh masyarakat.

- 3) Karisma pemimpin, sistem ini sah karena masyarakat mengagumi pemimpinnya yang dianggap memiliki kualitas luar biasa.¹⁰

Weber mempunyai pandangan yang abstrak mengenai bagaimana kekuasaan itu dianggap sah atau memiliki legitimasi. Dia tidak menjabarkan secara rinci bagaimana keyakinan seseorang terbentuk setelah menerima klaim atas legitimasi tersebut. Lebih lanjut, Weber membedakan jenis-jenis legitimasi seperti:

- a. Legitimasi legal-rasional yang didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas. Ketika masyarakat percaya pada rasionalitas, mereka cenderung memberikan legitimasi pada sistem yang berbasis aturan seperti birokrasi. Birokrasi dianggap suatu sistem yang paling efisien dan rasional dalam menjalankan kekuasaan.¹¹
- b. Legitimasi tradisional di mana kekuasaan dianggap sah karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat percaya bahwa aturan dan norma yang ada adalah benar dan wajar karena sudah ada sejak dulu. Pemimpin yang mengikuti tradisi ini dianggap memiliki hak untuk memerintah dan aturan baru hanya dapat diterima jika dianggap sebagai bagian dari tradisi yang ada.
- c. Legitimasi karismatik yang diperoleh karena pemimpin dianggap memiliki kualitas seperti kekuatan supranatural atau kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa.¹² Pengikutnya sangat mengagumi dan percaya akan adanya

¹⁰ Max Weber, *Ekonomi dan Masyarakat*. New York, NY: Bedminster. 1968. Hlm. 215

¹¹ Ibid, hm. 223

¹² Ibid, hm. 241

karisma tersendiri yang terlahir murni sejak lahir dan adapula karisma yang diciptakan secara sengaja.

1.5.1.3 Teori Identitas

1. Pengertian Identitas

Secara etimologi kata identitas berasal dari *identity* yang berarti kondisi atau perkataan tentang sesuatu yang sama, mirip satu sama lain, kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama diantara dua orang atau dua benda, kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama diantara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda, dan menunjukkan tentang suatu kebiasaan untuk memaami identitas melalui kata “identik”.¹³

Istilah identitas dengan pengertian yang beragam, sebagai mana diuraikan dalam buku “Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa” yang di dalamnya terdapat hubungan dengan individu, identitas etnis terbentuk menjadi identitas bangsa. Beberapa pengertian identitas antara lain: Identitas diartikan sebagai identik dengan yang lain yang mengarah pada adanya kesamaan individu dengan individu lainnya. Identitas juga berarti diri sendiri yang dilahirkan sebagai suatu individu yang memiliki jiwa tersendiri yang terhubung dengan proses kemerdekaan. Selain itu, identitas menjadi suatu ide baik itu ide karena sebuah ide yang melampaui batas dapat dengan kuat membentuk keseluruhan identitas. Serta identitas bukanlah hal yang statis, tetapi terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan lingkungan dan pengalaman hidup seseorang.¹⁴ Identitas dalam

¹³ Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007, hlm. 69.

¹⁴ Abd. Salam, *Pembentukan Identitas Masyarakat Kota Tarakan Melalui Museum Sejarah*, Depok: Universitas Indoesia, 2010, hlm. 23.

pengertian ini lebih dari menjadi diri sendiri yang tidak terlepas dari lingkungan budaya maupun lingkungan alamiah.

Identitas yang pasti merupakan suatu pilihan seseorang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun bahkan oleh negara. Pilihan tersebut juga bukanlah hal yang mudah karena setiap individu memiliki daya ingat personal masa lalu yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Suatu tradisi dapat membuat seseorang untuk tetap bertahan di wilayah sejarah masa lampau. Seperti yang dikatakan Stuart Hall bahwa identitas merupakan sebuah produk sosial dan layaknya sebuah produk maka identitas dapat dibentuk sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi.¹⁵

2 Identitas Sosial

Teori identitas sosial dikembangkan pertama kali pada tahun 1970-an oleh Hendri Tajfel. Identitas sosial merupakan pengetahuan bahwa seseorang milik suatu lingkungan sosial atau kelompok. Teori identitas sosial adalah akulturasi dari berbagai nilai kelompok yang disesuaikan ke dalam konsep diri seseorang.¹⁶ Tajfel mengartikan identitas sosial sebagai pengetahuan seseorang terhadap keanggotaan terhadap suatu kelompok bersama dengan menggunakan nilai dan emosional yang terasa di dalamnya. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan, rasa bangga, juga rasa peduli terhadap suatu kelompok.

Adanya identitas merupakan bagian dari teori identitas sosial yang dapat mengklasifikasikan anggota ke dalam kelompok. Identitas sosial seseorang dihasilkan dari kelompok mana ia bergabung, sehingga seseorang akan tertarik

¹⁵ Dewi A, Identitas sebagai dinamika sosial dari sudut pandang Stuart Hall: studi kasus kelompok etnis Cina Pasar Baru Jakarta, Doctoral dissertation FISIP-UI, 2005, hlm.

¹⁶ Abrams, D, 'Social Identity, Self as Structure and Self as Process,, in W. P. Robinson (ed.) *Social Groups and Identities*, Henri Tajfel, London: Butterworth Heinemann, 1996, hlm. 150

untuk bergabung dengan kelompok yang dinilai menarik dan memberi keuntungan. Selain itu, seseorang akan berjuang untuk mempertahankan identitas sosial yang baik. Oleh karena itu, teori identitas sosial dapat menunjukkan bagaimana keraton berfungsi sebagai simbol identitas nasional.

3 Identitas Budaya

Konsep identitas berhubungan erat dengan gagasan budaya. Identitas dapat dibentuk dengan budaya atau bagian dari budaya tempat seseorang menjadi bagian dan berpartisipasi. Perlu diakui bahwa terdapat berbagai teori mengenai identitas yang mengkaji hubungan antara identitas dan budaya dengan pendekatan yang berbeda. Teori yang dipengaruhi oleh pemikiran modern tentang budaya dan identitas cenderung memandang identitas sebagai sesuatu yang terbentuk secara langsung melalui keterlibatan dalam budaya atau subkultural tertentu.¹⁷

Stephen Frosh berpendapat bahwa identitas memang muncul dari budaya tetapi tidak hanya budaya yang membentuk identitas. Pandangan Frosh dipaparkan sebagai berikut: Teori-teori sosiologis dan psikologis mutakhir menekankan bahwa identitas seseorang sejatinya merupakan sesuatu yang ganda (multiple) dan encer secara potensial, dibangun melalui pengalaman dan di-kode-kan secara linguistik. Dalam mengembangkan identitas mereka, orang-orang merujuk pada sumber-sumber daya yang tersedia secara budayawi dalam jejaring sosial yang langsung mereka alami dan dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Proses konstruksi

¹⁷ Aniek Rahmaniah, *Budaya dan Identitas*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012, hlm.7

identitas diwarnai dan dipengaruhi secara signifikan oleh kontradiksi-kontradiksi dan disposisi-disposisi lingkungan sosio-budayawi yang mengitarinya.¹⁸

Identitas budaya dengan sengaja dibangun atau dibentuk dan berkaitan dengan beberapa proses tertentu serta pengalaman-pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Di dalam konstruksi identitas kita tidak hanya mempertimbangkan masa lampau namun juga hubungannya dengan masa kini dan masa depan. Melalui contoh kasus yang tertulis dalam buku “Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan” mengasumsikan bahwa identitas budaya sebagian memiliki sifat yang kompleks karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Dapat berubah dan diubah sesuai dengan konteksnya, pada kekuasaan, dan kepentingan pribadi (*vested interest*). Penentuan batas-batasnya memang sulit meskipun mempunyai kejelasan penanda yang dapat berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat pada budaya yang berkaitan.

Berbagai pandangan mengenai identitas menunjukkan bahwa identitas yang lahir dari “produk” sejarah dapat dikonstruksikan dan menyatakan sifatnya dapat berubah, terbentuk dan dibentuk berdasarkan ruang dan waktu¹⁹

4 Identitas Nasional

Hakikat identitas nasional adalah Pancasila yang penerapannya terlihat dalam penataan kehidupan. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam identitas nasional bersifat terbuka dan dapat ditafsirkan kembali agar dapat tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Identitas nasional bukanlah sesuatu yang statis,

¹⁸ Ibid, hlm.7

¹⁹ Abd. Salam, Op. Cit., hlm. 25.

melainkan sesuatu yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat.

Identitas nasional dalam konteks suatu bangsa mencakup unsur-unsur budaya, adat-istiadat, dan karakter khas yang dimiliki oleh negara tersebut. Identitas nasional dalam lingkup negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila sebagai dasar negara, bendera merah putih sebagai bendera nasional, Garuda Pancasila sebagai semboyan negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI yang berbentuk kedaulatan rakyat. Selain itu, identitas nasional juga tercermin dalam tokoh-tokoh pahlawan nasional yang berjuang pada masa kemerdekaan seperti Pangeran Antasari, Pattimura, dan lain-lain.

Identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan memberikan semangat bagi bangsa. Dengan memiliki identitas yang kuat, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat akan dihormati dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara-negara lain di dunia. Identitas bersama ini memiliki berfungsi sebagai ciri khas dan kepribadian bangsa, memperkuat rasa solidaritas dan persatuan antar masyarakat sehingga mendukung upaya pembangunan setelah kemerdekaan. Selain itu, identitas bersama juga dapat menjadi motivasi untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa di masa depan.

Identitas nasional adalah konsep kebangsaan yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga perlu dirumuskan oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Secara istilah, identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa yang lain.²⁰

²⁰ Kuswanto, *Identitas Nasional di Era Globalisasi*, Malang: Inara Publisher, 2023, hlm. 16-18

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah metode penelitian. Beberapa tujuan dari adanya kajian pustaka menurut Cooper (dikutip dalam Creswell, 2010) yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu, menghubungkan penelitian dengan berbagai literatur yang ada, serta mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa pustaka yang digunakan untuk membahas sejarah, perkembangan keraton kasepuhan, dukungan dan peran keraton kasepuhan pada masa revolusi. Pustaka pertama karya Sobana Harjdasaputra yang berjudul “Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20” yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini mengungkap perkembangan Cirebon dalam lima zaman yang dimulai abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 mulai dari zaman awal terbentuknya komunitas Islam di Cirebon, perkembangan sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan, hingga dinamika sosial politik yang terjadi. Buku ini relevan untuk memahami peran Keraton Kasepuhan dalam berbagai periode sejarah termasuk masa revolusi kemerdekaan.

Pustaka kedua karya Adeng, dkk dengan judul Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutera yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta yang membahas mengenai sejarah Cirebon sebagai bandar penting dalam jalur perdagangan internasional, terdapat pula bahasan mengenai entitas politik seperti keraton yang terlibat dalam perpolitikan. Di bahas

pula perkembangan kota Cirebon dari abad ke-15 sampai awal abad ke-20 baik itu sejarah kebudayaannya, perjalanan menjadi pusat penyebaran Islam, sebagai jaringan pasar dunia, serta Cirebon dalam arsip VOC. Memahami sejarah Cirebon sebagai pos perdagangan penting membantu mengontektuaisasikan mengapa Keraton Kasepuhan memainkan peran penting dalam mendukung persatuan nasional dan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Dengan menganalisis latar belakang sejarah ini, dapat menjeaskan elemen inklusif Keraton Kasepuhan Cirebon yang memperngaruhi proses pengambilan keputusannya selama periode kritis sejarah Indonesia.

Pustaka ketiga karya Van Oostom Soede yang berjudul *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*, terbit tahun 1931 dengan N.V.A.C. Nix Bandung sebagai penerbit. Buku ini diterbitkan menggunakan bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini menjelaskan megenai hal-hal yang ada di kota Cirebon mulai dari sejarah hingga menceritakan berbagai perubahan bentuk dan struktur pemerintahan Cirebon dari masa kesultanan sampai menjadi sebuah pemerintahan kota Cirebon.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, artikel ilmiah dengan judul “Peranan Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Bidang Sosial-Budaya: Kajian Historis Tahun 1950-2000” yang ditulis oleh Nur Tri Kartini pada tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana keraton berupaya mempertahankan tradis-tradisinya di tengah arus modernisasi yang tentunya

memiliki peran dominan yakni kerabat keraton sebagai keturunan langsung dari lingkungan ini. Perubahan kondisi sosial yang dialami pada saat itu membuat upaya pelestarian tradisi keraton ikut terpengaruh. Masih terdapat beberapa kerabat yang peduli terhadap kekayaan budaya lokal yang dimiliki keraton, namun sebagian besar memilih untuk berbaur dengan masyarakat pada umumnya, hal tersebut memberikan dampak baik itu positif maupun negatif seperti di satu sisi terbukanya keraton menjadikan budaya khas keraton mulai terkikis tapi di sisi lain berdampak baik pada hasil budaya keraton yang semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pada objek penelitian yang sama membahas Keraton Kasepuhan Cirebon dan berkontribusi pada pemahaman sejarah tentang keraton juga kontribusinya. Perbedaan pada tulisan penulis adalah hanya fokus pada periode 1945-1949 sementara penelitian Kartini mengkaji periode pasca revolusi 1950-2000 dan lebih menyoroti peran-peran keraton dalam menjaga dan melestarikan budaya.

Kedua, yakni artikel ilmiah dengan judul “Peran Keraton Cirebon dalam Pembentukan Identitas Nasional pada Masa Kemerdekaan Indonesia: Analisis Politik Islam dan Nilai Nasionalisme” ditulis oleh Muhammad Sungaidi dan Aktobi Ghozali pada 2024 yang dipublikasikan oleh jurnal Refleksi, volume 23, nomor 2. Artikel ini membahas mengenai peran Keraton Cirebon dalam pembentukan identitas nasional Indonesia melalui perspektif politik Islam dan nilai-nilai nasionalisme. Menganalisis bagaimana para sultan, terutama Sultan Muhammad Nurus yang memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) daripada mempertahankan status kerajaan yang mandiri. Selain itu artikel

ini menguraikan keputusan Keraton Cirebon yang mencerminkan komitmen terhadap persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan dari artikel ini adalah peran Keraton Cirebon baik itu melalui diplomasi ataupun kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan yang menjadikannya sebagai identitas nasional serta menyajikan juga hasil analisis hubungan antara pemerintahan pusat dan entitas lokal.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada peran keraton khususnya Kasepuhan Cirebon dan keduanya menyoroti periode yang sama yaitu masa sekitar kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Selain itu, persamaan lainnya adalah keduanya menyoroti keterlibatan keraton dalam dinamika politik terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam konteks pembentukan identitas nasional atau revolusi kemerdekaan. Perbedaan pada tulisan ini dengan tulisan penulis adalah artikel analisisnya lebih mendalam dan melibatkan dimensi politik Islam juga nilai-nilai nasionalisme yang saling berinteraksi sedangkan tulisan penulis hanya menganalisis peran keraton secara umum dengan batasan waktu tertentu.

Ketiga, artikel ilmiah yang berjudul “Peran Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai Pusat Pemeliharaan dan Pembangunan Budaya” tulisan Dian Lestari, Heri Kurnia, Dina Nurayu, dan Isrofiah Laela Khasanah tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, volume 1, nomor 2, hal. 98-113. Artikel ini berkontribusi dalam promosi dan pengembangan pariwisata budaya, selain itu juga berperan sebagai lembaga pendidikan budaya yang mendorong generasi muda untuk melestarikan warisan budaya.

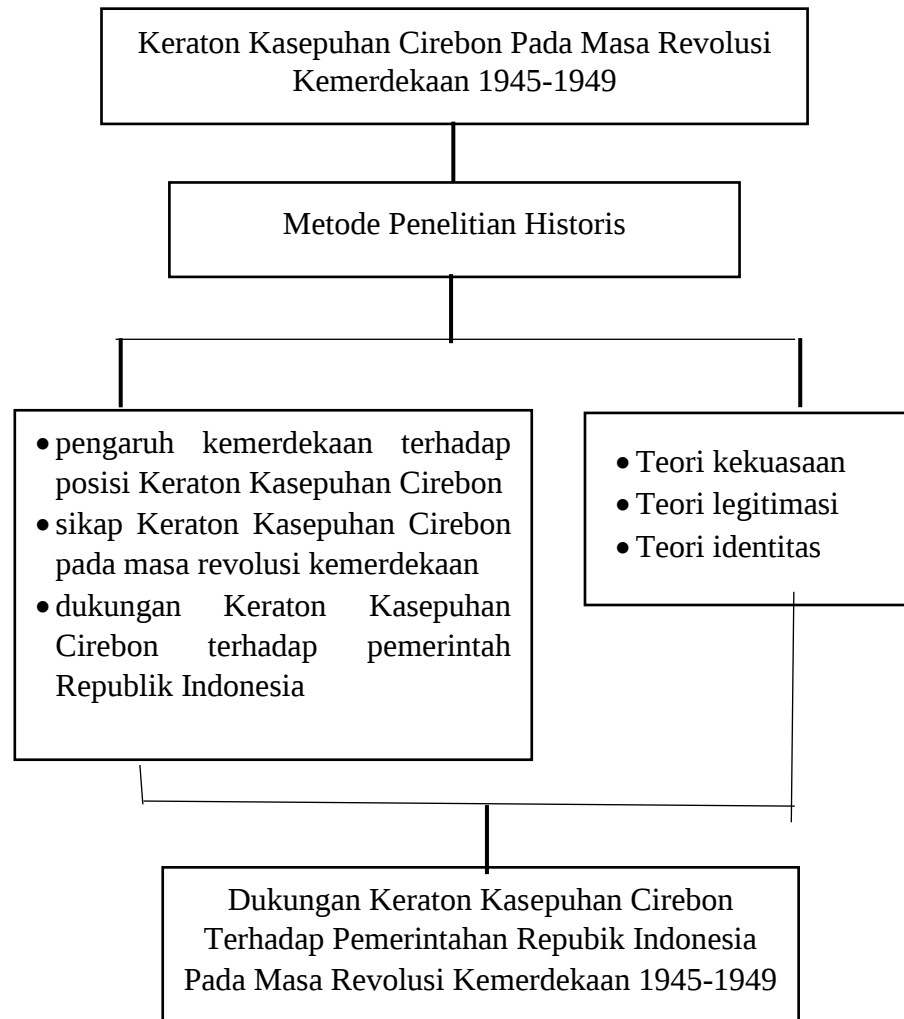
Persamaan dengan penelitian ini adalah memiliki objek penelitian yang sama karena membahas mengenai Keraton Kasepuhan yang berfokus pada peran. Perspektif dan cakupan waktu menjadi perbedaan karena pada penelitian Dian dkk tidak terikat pada periode tertentu namun fokus pada keberlanjutan keraton dalam menjaga dan mengembangkan budaya Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membatasi kajian pada periode revolusi kemerdekaan 1945-1949. Selain itu, fokus utama penelitian penulis berfokus pada aspek politik yaitu dukungan Keraton Kasepuhan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek sosial dan budaya.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana adanya dugaan yang akan diteliti. Kerangka konseptual juga digunakan untuk memudahkan bagaimana susunan dalam penelitian yang menjelaskan fenomena dan informasi yang didapatkan secara terperinci. Kerangka konseptual dalam penulisan ini juga dapat membantu penulis dalam meneliti sebuah konsep yang tidak jauh dari konsep-konsep sebelumnya.

Penelitian yang berjudul “Dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon Terhadap Pemerintahan Republik Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949” menggunakan tiga teori sebagai tahap awal untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang akan diteliti nantinya yakni teori kekuasaan, teori legitimasi dan teori identitas. Dengan bantuan metode penelitian sejarah yang memiliki beberapa tahapan untuk dilakukan seperti pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hal tersebut dapat mengungkap bagaimana sikap

serta dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa revolusi kemerdekaan serta mengetahui pengaruh kondisi sosial-politik pada masa revolusi kemerdekaan terhadap eksistensi Keraton Kasepuhan.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber,

interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah) yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo.²¹

1.6.1 Pemilihan Topik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik. Pada tahapan ini, ditentukanlah topik yang nantinya akan dikaji mengenai topik sejarah. Kuntowijoyo mengemukakan bahwa pemilihan topik penelitian sejarah perlu didasarkan atas kedekatan peneliti dengan objek penelitiannya. Kedekatan tersebut didasarkan atas dua aspek yaitu kedekatan intelektual dan emosional.

Dalam penelitian sejarah, sudah seharusnya untuk memenuhi prasyarat dalam pemilihan topik seperti topik haruslah unik, menarik, memiliki arti penting serta bermanfaat bagi pengetahuan dan kegunaan lainnya dan masalah dalam topik harus memungkinkan untuk diteliti.²²

Aspek emosional dengan objek penulisan ini terletak pada latar belakang orang tua peneliti yang merupakan alumni sekolah seni Keraton Kasepuhan dan kisah cinta mereka bersemi di sana sehingga menimbulkan keinginan untuk meneliti tentang keberadaan Keraton Kasepuhan. Aspek intelektual dengan objek penulisan ini tergugah peneliti menelaah berbagai literatur mengenai sejarah dan eksistensi Keraton Kasepuhan Cirebon khususnya pada periode revolusi kemerdekaan yang belum banyak diteiti.

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 69

²² Dyah Kumalasari, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Batas waktu temporal yang ditentukan peneliti untuk penelitian ini adalah tahun 1945-1949 yang bertepatan dengan masa revolusi kemerdekaan. Batas awal temporal digunakan tahun 1945 dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun perjuangan Indonesia untuk merdeka sekaligus menjadi momen krusial dalam sejarah karena terdapat transisi di Keraton Kasepuhan yang awalnya sebagai pusat pemerintahan, menjadi pusat kebudayaan, sedangkan batas akhir temporal tahun 1949 karena merupakan akhir dari masa revolusi kemerdekaan.

1.6.2 Heuristik

Heuristik merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yakni *heuristiken* yang artinya mengumpulkan sumber. Sumber yang dimaksud dalam kaitannya dengan sejarah adalah sumber yang tersebar baik itu dalam bentuk catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lainnya yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia. Sumber-sumber tersebutlah yang dikategorikan sebagai sumber sejarah.²³

Tahap heuristik adalah kegiatan untuk mengumpulkan sumber, data, dan informasi mengenai tema atau topik yang akan dikaji. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, karena sebelum melakukan penelitian dan setelah memilih topik, kemudian memasuki tahapan heuristik untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang ada. Terdapat beberapa jenis sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai acuan

²³ M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014. hlm. 219

dalam penelitian sejarah seperti sumber tertulis, yang terdiri dari prasasti, buku, koran, artikel, dan sumber tertulis lain yang sezaman dengan peristiwa sejarah yang diteliti. Terdapat pula sumber benda yang dijadikan referensi dalam proses penelitian sejarah, di mana sumber benda ini merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik meliputi bangunan, ornamen, furnitur, foto, dan sumber suara. Selain itu ada juga sumber lisan, sumber yang didapatkan langsung dari salah satu tokoh yang bersangkutan dengan peristiwasejarah yang akan diteliti. Tidak hanya itu, sumber lisan ada yang berupa tradisi seperti mitos, legenda, dan dongeng.²⁴

Terdapat sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip-arsip resmi baik yang terdapat di keraton walaupun tidak dapat didokumentasikan maupun di kediaman sejarawan Cirebon. Selain itu, wawancara juga dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Wawancara ini biasanya dilakukan agar mendapatkan informasi yang lebih dari para narasumber dengan mendasar pada sebuah laporan keadaan pengetahuan serta keyakinan dari narasumber tersebut. Instrumen wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara. Penulis memperoleh langsung informasi dari pengelola Keraton Kasepuhan dan sejarawan Cirebon diantaranya:

1. Bapak Iman Sugiman yang merupakan mantan abdi dalem Keraton Kasepuhan yang sekarang menjadi Kepala Pemandu dan Promosi Wisata.
2. Bapak Raden Nanung Udali yang merupakan Wakil Pemandu dan Promosi Wisata Keraton Kasepuhan.

²⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2*, Bandung: Satya Historika, 2020, hlm. 115.

3. Bapak Mustaqim Asteja yang merupakan Sejarawan Cirebon, Penjaga Cagar Budaya, Dosen Luar Biasa Budaya di Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon, dan Pengajar Bahasa dan Sastra Cirebon.

Penulis melakukan observasi langsung ke Keraton Kasepuhan untuk melihat data di lapangan dan sisa bangunan sebagai bukti sejarah dan mengunjungi kearsipan Kota Cirebon. Penulis juga mengumpulkan sumber dengan teknik studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, dokumen, arsip, jurnal, dan sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku serta artikel ilmiah sebagai pendukung dalam penelitian agar bisa melengkapi fakta yang ada di lapangan, diantaranya:

1. Koran-koran sebagai informasi bagaimana aktivitas keraton selama masa sebelum dan setelah revolusi dan bagaimana sikap keraton terhadap perjuangan kemerdekaan. Koran-koran tersebut adalah koran Gragepedia Ensiklopedia Pusaka Cirebon yang diterbitkan 11, 18, dan 25 Agustus 2014 yang membahas kemerdekaan Indonesia.
4. Buku Babad Tanah Jawi karya Sejipto Abimanyu tahun 2017. Buku ini memberikan narasi mendalam tentang peristiwa sejarah, tradisi, serta nilai-nilai yang membentuk identitas masyarakat Jawa, selain itu, buku ini dapat memperkuat argumen atau analisis.
5. Buku Tjorat-Tjaret dari Djaman ke Djaman karya Sewaka tahun 1955 yang membahas mengenai perjalanan Sewaka dari awal menjadi camat hingga menjadi Gubernur Jawa Barat dan harus mengendalikan roda pemerintahan

secara sembunyi-sembunyi. Weadana Kota Tjirebon juga dibahas untuk menjelaskan bagaimana sistem administrasi pemerintahan di Cirebon yang dibentuk oleh pemerintah kolonial.

6. Artikel yang berjudul *Kraton Cirebon dalam Aliran Sejarah (1452-1809 M)* karya Wawan Hernawan tahun 2023 yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan historis ini dapat mempengaruhi posisi keraton dalam konteks nasionalisme dan identitas Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan.
7. Artikel karya Muhammad Sungaidi dan Aktobi Gozali tahun 2024 yang menjelaskan keterlibatan keraton dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menekankan peran keraton untuk pembentukan identitas nasional dan analisis tentang hubungan keraton dengan pemerintah pusat yang memberikan temuan dinamika politik lokal selama masa revousi kemerdekaan.
8. Buku yang berbahasa Belanda tahun 1931 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang membahas sejarah dan perkembangan Cirebon termasuk Keraton Kasepuhan di dalamnya karya Van Oostom Soede yang berjudul *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*.

Beberapa tempat yang penulis kunjungi untuk mendapatkan sumber yang relevan selain Keraton Kasepuhan antara lain, Perpustakaan 400 kota Cirebon, Kearsipan Kota Cirebon, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia dan kediaman sejarawan yang menyimpan banyak dokumen.

1.6.3 Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, hal yang dilakukan selanjutnya adalah memverifikasi (kritik) sumber. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan upaya untuk mendapatkan kredibilitas sumber. Proses ini merupakan tahapan memilih dan memilah serta mempertimbangkan sumber yang dilihat dari fisik maupun isinya. Terdapat dua macam verifikasi atau kritik sumber yaitu kritik ekstern dan kritik intern.²⁵

Kritik ekstern adalah tahapan verifikasi yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap keaslian sumber. Sedangkan kritik intern merupakan tahap verifikasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kredibilitas dan reliabilitas isi berbagai sumber yang ada.

Kritik ekstern dimaksudkan untuk memastikan keabsahan sumber secara fisik seperti dengan menganalisis tahun dikeluarkannya sumber dan bahan yang digunakan untuk penulisan sumber, sedangkan untuk kritik intern dimaksudkan untuk memastikan isi sumber dan membandingkannya dengan berbagai sumber yang lain. Kritik ekstern untuk sumber-sumber skripsi ini telah dilakukan dengan cara mengidentifikasi identitas sumber seperti penulis, penerbit, tahun terbit, dan keaslian bahannya. Kritik intern untuk sumber-sumber juga telah dilakukan dengan menelaah isi berbagai sumber, membandingkan, dan menghubungkan data dari satu sumber dengan data yang didapatkan dari sumber lainnya.

²⁵ Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 77

Kritik sumber ini dilakukan pada buku dan artikel terkait seperti pada buku Babad Tanah Jawi yang beberapa di dalamnya terdapat sumber dari blogspot yang dapat menimbulkan keraguan mengenai keakuratan dan kreadibilitas informasi, runtutan narasi yang sedikit mengganggu alur cerita karena pencampuran informasi yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca, dan kritik terhadap metodologi terkait bagaimana data tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan dengan sumber lain.

Kritik pada artikel Keraton Cirebon dalam Aliran Sejarah (1452-1809 M) mencakup beberapa aspek yaitu hanya mengandalkan sumber-sumber tertentu yang tidak selalu mewakili seluruh narasinya yang dapat mengakibatkan adanya bias dalam penafsiran sejarah, cara penulis menginterpretasikan peristiwa sejarah dan penafsiran yang terlalu subjektif atau dipengaruhi oleh pandangan pribadi.

Artikel lain yang diverifikasi adalah Peran Keraton Cirebon dalam Pembentukan Identitas Nasional pada Masa Kemerdekaan Indonesia: Analisis Politik Islam dan Nilai Nasionalisme dengan beberapa kritik yaitu artikel ini lebih mengandalkan wawancara dan kurang memberikan konteks sejarah yang mendalam mengenai hubungan antara Keraton Cirebon dan pemerintah pusat sebelum kemerdekaan yang penting untuk memahami latar belakang keputusan politik keraton.

1.6.4 Interpretasi

Setelah kritik sumber dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi ini proses menafsirkan fakta-fakta untuk

menetapkan makna dari isi sumber-sumber yang saling berkaitan.²⁶ Interpretasi merupakan tahap penting dalam penelitian sejarah karena dari sinilah makna-makna terdalam dari peristiwa masa lalu dapat diungkapkan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan fokus kajian yang diambil.

Interpretasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi dilakukan dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta tersebut, dan dari situlah dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan untuk interpretasi sintesis dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.

Pada tahap interpretasi ini peneliti dapat menguraikan, menjelaskan, dan menyatukan segala informasi mengenai topik yang sedang diteliti, dalam proses ini peneliti dituntut untuk bersikap kritis, selektif, dan objektif. Fakta yang telah dikumpulkan tidak cukup hanya dipaparkan secara deskriptif, melainkan harus diberi makna dan ditafsirkan dalam konteks ruang dan waktu yang tepat. Artinya, sebuah fakta sejarah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi pada zamannya. Hal tersebut menjadikan interpretasi sebagai jembatan data yang penting yang berkaitan dengan narasi sejarah yang utuh dan bermakna.

Interpretasi juga dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menyadari keberpihakan atau bias yang mungkin muncul, agar hasil interpretasi tetap proporsional dan tidak mengaburkan realitas

²⁶ Nina H. Lubis, *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020, hlm. 30.

sejarah. Peneliti sering kali menggunakan teori-teori tertentu, seperti teori kekuasaan, identitas budaya, atau teori legitimasi untuk memperkuat hasil interpretasinya agar lebih ilmiah dan terarah.

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan keberadaan Keraton Kasepuhan Cirebon di masa revolusi kemerdekaan 1945-1949 sesuai dengan sumber yang telah melalui proses pencarian, penghimpunan, serta kritik sumber. Dengan demikian, interpretasi bukan hanya menafsirkan fakta, tetapi juga proses pemaknaan sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan pemahaman masa kini. Tahap ini menjadi pondasi penting sebelum melangkah ke tahap akhir metode penelitian sejarah yaitu penulisan historiografi.

1.6.5 Historiografi

Tahapan historiografi adalah tahapan proses penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di semua sumber yang telah melewati semua tahap. Penulisan historiografi harus disusun secara objektif dan sistematis.²⁷ Historiografi juga sering dikatakan sebagai sarana komunikasi dari hasil penelitian tulisan ini dapat diungkap, diverifikasi, dan diinterpretasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa sejarah memerlukan penelitian sebelum disajikan dalam bentuk historiografi. Dalam penulisan sendiri akan dilakukan dengan benar dan tepat jika menggunakan tahapan dari metode penelitian

²⁷ Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 78-79

sejarah. Penulis melakukan berhistoriografi dengan sumber-sumber yang sudah melalui ketentuan-ketentuan di atas.

Pada tahapan ini penulis melakukan penulisan kembali peristiwa sejarah yang berdasarkan sumber eksternal, sumber internal, sumber primer, dan sumber sekunder secara jelas dan mudah dipahami alur peristiwa dengan mencantumkan periodisasi.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian sejarah adalah sebuah penjabaran yang secara garis besar dalam tulisan di dalamnya hanya menjelaskan tentang awal, isi dan akhir dari tulisan yang akan dijadikan penelitian. Pada penelitian ini sendiri berjudul “Peranan Keraton Kasepuhan Cirebon Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949” yang terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoritis, kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian sejarah, dan sistematika pembahasan.

BAB II hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai pengaruh kemerdekaan terhadap posisi Keraton Kasepuhan yang di dalamnya meliputi peran keraton sebelum kemerdekaan, struktur pemerintahan keraton, dampak proklamasi kemerdekaan terhadap keraton dan perubahan posisi sosial dan politik keraton.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai sikap Keraton Kasepuhan pada masa revolusi kemerdekaan meliputi sikap keraton terhadap penjajahan dan keterlibatan keraton dalam perjuangan kemerdekaan.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai dukungan Keraton Kasepuhan terhadap pemerintah Republik Indonesia seperti bentuk dukungan keraton kepada pemerintah serta kontribusi keraton dalam pembentukan identitas nasional.

BAB V kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bagian penutup tulisan dengan simpulan dan saran. Simpulan menjelaskan pemaknaan hasil dari penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Hasil analisis dari temuan penelitian harus menampilkan hal-hal penting yang bermanfaat. Bagian saran menjelaskan saran bagi kepentingan praktis dan dapat dicantumkan implikasi penelitian.